

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Dita Rahmadini^{1*}, Rini Indriani², Nucke Febriana³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

¹drahmadini217@gmail.com, ²rindriani@unib.ac.id, ³nuckefebriana05@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 16 November 2023

Disetujui : 20 November 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2024

ABSTRACT

This study was conducted in western Indonesian cities during 2020-2022. This study aims to determine how the influence of local government financial performance on capital expenditure in western Indonesian cities both simultaneously and partially as seen from the fiscal decentralization ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio. This study uses a quantitative and descriptive analysis approach. The population of this study was 64 in western Indonesian cities using nonprobability sampling technique, so the sample included 192 financial statements from 3 years of observations. As well as technical documentation collects data through the regional government director's balance sheet website. The analytical method in this study is panel data regression. The results testing with panel data regression using the Fixed Effect Model (FEM) show that financial performance simultaneously influences capital expenditure in western Indonesian cities during 2020-2022. Figure $F > F$ table result obtained ($2.853526 > 2,65$), significance ($0,000000 < 0,05$). From the partial test results fiscal decentralization ratio has a negative effect and significance on capital expenditure allocation, effectiveness ratio has a positive effect and significance on capital expenditure allocation, and efficiency ratio has a positive effect and significance on capital expenditure Allocation in western Indonesian cities during 2020-2022.

Keywords : Effectiveness, Efficiency, Capital Expenditure Allocation, Fiscal Decentralization.

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah semakin sering dilakukan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan dengan baik agar mencapai kemandirian keuangan daerah. Dengan adanya kemandirian keuangan, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan (Sulistyo, 2018). Kemandirian keuangan suatu daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi seluruh kebutuhan belanja pemerintah, baik belanja operasional maupun belanja modal. Semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi kemandirian suatu daerah tersebut.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diharapkan dapat direalisasikan semaksimal mungkin. APBD merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan dalam satu tahun anggaran (Robinson, 2021). Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya (Ekowati & Fintariasari, 2020).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah derajat kinerja studi keuangan daerah di daerah, termasuk pendapatan dan pengeluaran daerah dengan menggunakan sistem keuangan (Ula et al.,



2022). Menurut (Nurarifah et al., 2022) Kinerja keuangan dapat diukur dengan melihat realisasi alokasi anggaran pemerintah. Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan adalah analisis rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja daerah tersebut dalam mengalokasikan dananya untuk kesejahteraan masyarakat (Dzulhidayat, 2022).

Pandangan (Husna et al., 2022) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemda lebih rendah jika dilihat dengan kinerja keuangan swasta, Hal ini dikarenakan adanya kepentingan politik dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* (teori keagenan) yang melihat adanya hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dengan masyarakat sebagai prinsipal, pemerintah daerah akan bertindak sesuai dengan tugas yang telah di berikan oleh masyarakat dalam membuat kebijakan dan mengesahkan anggaran demi meningkatkan PAD. Namun, menurut (Kadek & Indrawati, 2019) dalam kenyataannya pemerintah daerah akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugasnya sehingga hal itu akan mempengaruhi masyarakat (*principal*) dalam menilai kinerja pemerintah daerah (*agent*).

Kinerja pemerintahan kota – kota di Indonesia wilayah barat tentu saja sangat beragam ada yang dinyatakan baik dan tidak sedikit juga masuk kategori kurang baik bahkan buruk. Meskipun di beberapa kota dinyatakan baik, namun pada kenyataannya masih banyak yang harus diperbaiki. Salah satu masalah yang dihadapi adalah rendahnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, serta ketergantungan pemerintah daerah yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Sedangkan setiap kota di Indonesia wilayah barat memiliki berbagai potensi alam yang dapat dikelola untuk kepentingan peningkatan pendapatan asli daerah, yaitu berupa tempat destinasi pariwisata.

Adanya pergeseran pola belanja dalam pemerintah daerah khususnya belanja modal untuk pelayanan publik memicu permasalahan tentang sejauh mana besarnya pendapatan daerah mempengaruhi pola belanja pemerintah daerah khususnya belanja modal untuk pelayanan publik (Novita & Nurhasanah, 2021). Menurut (Andriyani et al., 2020) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (publik) dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah daerah dalam menggunakan sumber pendapatan daerah lebih banyak untuk belanja modal pelayanan publik. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, menyebutkan bahwa Belanja Modal merupakan outcome yang digunakan dalam rangka memenuhi kegiatan untuk memperoleh aset aset dalam ekonomi yang bermanfaat untuk pemerintah daerah itu sendiri selama satu periode, belanja modal ini terdiri dari perolehan atas bangunan baik itu berupa tanah maupun gedung, dan aset tak berwujud lainnya (Azzahra & Sudrajat, 2022).

Penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal sebelumnya sudah pernah diteliti oleh (Azzahra & Sudrajat, 2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran rasio yang berpengaruh terhadap alokasi belanja modal yaitu rasio efisiensi dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Penelitian (Andriyani et al., 2020) memberikan hasil bahwa rasio pertumbuhan PAD dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan rasio desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas tidak berpengaruh. Penelitian (Marlianita & Saleh, 2020) memberikan hasil bahwa rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian (Praza et al., 2016) menemukan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil yang berbeda juga ditemukan oleh (Novita & Nurhasanah, 2021) yang menunjukkan bahwa rasio ketergantungan, efektivitas dan efisiensi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja modal. Penelitian (Setiawina, 2015) menemukan hasil derajat desentralisasi fiskal dan efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Melihat dari kajian tersebut terdapat kesenjangan penelitian dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap PAD. Meskipun telah ada penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap belanja modal di wilayah lain di Indonesia, namun masih kurangnya penelitian yang secara khusus berfokus pada kinerja keuangan kota kota di Indonesia wilayah barat. Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, mewujudkan akuntabilitas publik serta mengetahui bagaimana kinerja keuangan mempengaruhi belanja modal kota – kota di Indonesia wilayah barat. Penilaian kinerja keuangan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak baik secara internal maupun eksternal pemerintah daerah itu sendiri. Para pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah daerah dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang keuangan di kota kota Indonesia wilayah barat, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih efektif.

STUDI LITERATUR

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut (Mianti & Fachruzzaman, 2020) rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut menjalankan otonomi daerah (Dzulhidayat, 2022).

Rasio Derajat desentralisasi Fiskal dapat diukur dengan :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD

Pengertian efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi (Fachruzzaman & Martiah, 2013). Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut (Fachruzzaman et al., 2021) semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki, akan semakin memungkinkan bagi daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya, tanpa harus bergantung lagi pada pemerintah pusat.

Rasio Efektivitas PAD dapat diukur dengan :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu (Fachruzzaman & Baihaqi, 2021). Menurut (Ula et al., 2022) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara total beban pokok penerimaan dengan realisasi penerimaan. Semakin rendah rasio efisiensi ekonomi daerah, semakin baik kinerja ekonomi pemerintah daerah. Rumus yang digunakan untuk harmonisasi rasio menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi modal yang optimal untuk belanja saat ini dan pembangunan. Semakin tinggi rasio alokasi modal terhadap pengeluaran saat ini, semakin rendah proporsi modal investasi (pengeluaran pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan utilitas dan infrastruktur bagi Masyarakat.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat diukur dengan :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$



Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin (Setiawina, 2015). Disebutkan juga bahwa terdapat batasan untuk porsi belanja modal, dimana belanja modal pada kabupaten diharapkan dapat mencapai 30% dari total belanja pemerintah (Azzahra & Sudrajat, 2022).

Rasio belanja Modal dapat diukur dengan :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kota – kota di Indonesia wilayah barat dengan pengambilan data dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Ekowati & Finthariasari, 2020) Penelitian Kuantitatif adalah suatu penelitian yang ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Pendekatan ini diawali dari data yang di proses menjadi informasi berharga bagi pengambilan keputusan.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang terdiri dari data *time series* yaitu data tahun 2020-2022 dan data *cross section* yaitu data 64 kota di Indonesia wilayah barat yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Untuk menganalisis data dengan analisis regresi data panel menggunakan bantuan dari software Eviews 10. Analisis regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kota kota di Indonesia wilayah barat. Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (Belanja Modal)

A = Konstanta

X1 = Variabel independen 1 (Rasio Desentralisasi Fiskal)

X2 = Variabel independen 2 (Rasio Efektivitas)

X3 = Variabel independen 3 (Rasio Efisiensi)

b(1...2) = Koefisien regresi masing masing variabel independen

e = *Error term*

t = Waktu

I = Pemerintah daerah

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kota di Indonesia wilayah barat menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *sampling* jenuh. Indonesia memiliki 3 (tiga)

pembagian wilayah waktu, yaitu Wilayah Indonesia bagian Barat (WIB), Wilayah Indonesia bagian Timur (WIT), dan Wilayah Indonesia bagian Tengah (WITA). Indonesia wilayah barat berada pada garis bujur 105° BT. Berdasarkan Wikipedia Indonesia wilayah barat terdiri dari 18 Provinsi dan 69 Kota. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya 64 kota selama 3 tahun terakhir (2020 – 2022), dikarenakan pada website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan hanya tersedia 64 kota di Indonesia wilayah barat dimana untuk kota yang berada pada provinsi DKI Jakarta tidak tersedia.

HASIL

Penjabaran Statistik Deskriptif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 64 kota di Indonesia wilayah barat dalam kurun waktu 3 tahun. Hasil deskriptif statistik meliputi minimum, maximum, mean dan standar deviasi dari variabel penelitian. Hasil dari statistik deskriptif, yaitu :

Tabel 1. Penjabaran Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	23.88766	91.93542	100.1416	2.734854
Median	22.86500	89.84000	99.24500	2.750471
Maximum	60.45000	180.9800	167.2700	5.178182
Minimum	3.880000	28.19000	81.30000	0.378436
Std. Dev.	12.53158	24.69750	8.212584	0.464137

Sumber : Output Eviews 10 (2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa berdasarkan data statistik rata rata variabel rasio desentralisasi fiskal (X1) adalah sebesar 23.88766 atau 23,88% yang menunjukkan rata rata kemampuan keuangan daerah kota di Indonesia wilayah barat tergolong cukup baik. Rata rata variabel rasio efisiensi (X2) adalah sebesar 91.93542 atau 91,93% yang menunjukkan rata rata kemampuan keuangan daerah kota kota di Indonesia wilayah barat tergolong efektif. Rata rata variabel efisiensi (X3) adalah sebesar 100.1416 atau 100,14% yang menunjukkan rata rata kemampuan keuangan daerah kota kota di Indonesia wilayah barat tergolong tidak efisien. Dan rata rata rasio belanja modal (Y) adalah sebesar 2.734854 atau 2,73%.

Pemilihan Model

Dalam analisis ini diperlukan beberapa uji dengan tujuan untuk memilih tipe regresi mana yang paling cocok digunakan pada penelitian ini.

Uji Chow

Dalam uji chow keputusan pengambilan model yaitu, jika prob > 0,05 maka model yang cocok adalah CEM (*Common Effect Model*). Jila prob < 0,05 maka model yang cocok adalah FEM (*Fixed Effect Model*).

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.803564	(63,125)	0.0000
Cross-section Chi-square	169.126910	63	0.0000

Sumber : Output Eviews 10 (2023)



Berdasarkan hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0000. Hal ini memberikan hasil bahwa model yang cocok pada uji chow ini yaitu, FEM (*Fixed Effect Model*) dimana nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau ($0,0000 < 0,05$).

Uji Hausman

Dalam uji hausman keputusan pengambilan model yaitu, jika $prob > 0,05$ maka model yang cocok adalah REM (*Random Effect Model*). Jika $prob < 0,05$ maka model yang cocok adalah FEM (*Fixed Effect Model*).

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.208555	3	0.0169

Sumber : Output Eviews 10 (2023)

Berdasarkan hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0169. Hal ini memberikan hasil bahwa model yang cocok pada uji chow ini yaitu, FEM (*Fixed Effect Model*) dimana nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau ($0,0169 < 0,05$).

Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi linier data panel yang paling cocok digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode *Fixed Effect Model* (FEM). Penentuan metode FEM sebagai metode analisis regresi linier ini didasarkan pada uji chow dan uji hausman yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut persamaan regresi data panel dalam penelitian ini :

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.078179	0.392183	5.299010	0.0000
-	-	-	-	-
X1	0.050426	0.014754	-3.417779	0.0009
X2	0.008192	0.002249	3.643023	0.0004
X3	0.011065	0.004095	2.701881	0.0079

Sumber : Output Eviews 10 (2023)

Berdasarkan tabel hasil regresi diatas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 2,078179 - 0,050426 X1 + 0,008192 X2 + 0,011065 X3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 2,078179 memberikan arti bahwa jika rasio desentralisasi fiskal (X1), rasio efektivitas (X2), dan rasio efisiensi (X3) sama dengan 0, maka belanja modal (Y) secara konstan bernilai 2,078179.
2. Nilai koefisien variabel rasio desentralisasi fiskal (X1) sebesar $-0,050426$ yang berarti setiap kenaikan 1 persen variabel rasio desentralisasi fiskal, maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 0,050426 dengan asumsi variabel lain dianggap konstant atau tetap (*ceteris paribus*)
3. Nilai koefisien variabel rasio efektivitas (X2) sebesar 0,008192 yang berarti setiap kenaikan 1 persen variabel rasio efektivitas, maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 0,008192 dengan asumsi variabel lain dianggap konstant atau tetap (*ceteris paribus*)
4. Nilai koefisien variabel rasio efisiensi (X3) sebesar 0,011065 yang berarti setiap kenaikan 1 persen variabel rasio efisiensi, maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 0,011065 dengan asumsi variabel lain dianggap konstant atau tetap (*ceteris paribus*)

Uji Asumsi Klasik

Menurut pandangan (Basuki & Yuliadi, n.d.) pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas berguna untuk memeriksa bagaimana bentuk regresi menemukan korelasi sesama variabel independen (bebas).

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.140455	0.077725
X2	0.140455	1.000000	-0.044245
X3	0.077725	-0.044245	1.000000

Sumber : Output Eviews 10 (2023)

Berdasarkan Tabel 5 terlihat tidak terjadi masalah multikolinieritas antar variabel independen. Suatu variabel terbebas dari masalah multikolinieritas jika hasil korelasi antar variabel $< 0,80$. Korelasi antara variabel X1 dan X2 sebesar $0,140455 < 0,80$. Korelasi antara X1 dan X3 sebesar $0,077725 < 0,80$. Korelasi antara X2 dan X3 sebesar $-0,044245 < 0,80$.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat varian yang berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan lain.

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.527929	12.49571	-0.522414	0.6023
X1	0.252667	0.470092	0.537484	0.5919
X2	0.014074	0.071648	-0.196429	0.8446
X3	0.077118	0.130488	0.590997	0.5556

Sumber : Output Eviews 10 (2023)

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil probabilitas variabel X1, X2, X3 lebih besar dari 0,05.

Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Tes Parsial digunakan untuk menguji bagaimana setiap variabel bebas mempunyai dampak parsial independen terhadap variabel terikat. Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji T Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.078179	0.392183	5.299010	0.0000
X1	0.050426	0.014754	-3.417779	0.0009
X2	0.008192	0.002249	3.643023	0.0004
X3	0.011065	0.004095	2.701881	0.0079

Sumber : Output Eviews 10 (2023)

Tabel 7 diatas menunjukkan nilai t-statistic dari perhitungan eviews 10 untuk masing masing variabel, yaitu rasio desentralisasi fiskal -3,417779, rasio efektivitas 3,643023, dan rasio efisiensi 2,701881. Rasio desentralisasi fiskal (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal (Y), sesuai dengan hasil analisis uji t untuk variabel desentralisasi fiskal terhadap belanja modal bahwa t-statistic $-3,417779 < t\text{-tabel } 1,97266$ dan nilai signifikansi $0,0009 < 0,05$. Rasio efektivitas (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y), sesuai dengan hasil analisis uji t untuk variabel efektivitas terhadap belanja modal bahwa t-statistic $3,643023 > t\text{-tabel } 1,97266$ dan nilai signifikansi $0,0004 < 0,05$. Rasio efisiensi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y), sesuai dengan hasil analisis uji t untuk variabel efisiensi terhadap belanja modal bahwa t-statistic $2.701881 > t\text{-tabel } 1,97266$ dan nilai signifikansi $0,0079 < 0,05$.

Tes F (Simultan)

Tes F digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian secara simultan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Uji F

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.078179	0.392183	5.299010	0.0000
X1	0.050426	0.014754	-3.417779	0.0009
X2	0.008192	0.002249	3.643023	0.0004
X3	0.011065	0.004095	2.701881	0.0079

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.601063	Mean dependent var	2.73485	4
Adjusted R-squared	0.390424	S.D. dependent var	0.46413	7
S.E. of regression	0.362376	Akaike info criterion	1.07646	8
Sum squared resid	16.41457	Schwarz criterion	2.21319	8
Log likelihood	36.34090	Hannan-Quinn criter.	1.53685	2
F-statistic	2.853526	Durbin-Watson stat	2.76831	5
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Eviews 10 (2023)

Berdasarkan Tabel 8 nilai F-Statistic yang diperoleh adalah 2,853526 > F tabel 2,65 dengan tingkat signifikansi 0,000000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal (Y).

Tes Koefisien Determinasi

Tes Koefisien Determinasi berguna untuk menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square.



Tabel 9. Tes Koefisien Determinasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.078179	0.392183	5.299010	0.0000
X1	0.050426	0.014754	-3.417779	0.0009
X2	0.008192	0.002249	3.643023	0.0004
X3	0.011065	0.004095	2.701881	0.0079

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.601063	Mean dependent var	2.734854
Adjusted R-squared	0.390424	S.D. dependent var	0.464137
S.E. of regression	0.362376	Akaike info criterion	1.076468
Sum squared resid	16.41457	Schwarz criterion	2.213198
Log likelihood	36.34090	Hannan-Quinn criter.	1.536852
F-statistic	2.853526	Durbin-Watson stat	2.768315
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output Eviews 10 (2023)

Berdasarkan tabel 9 nilai Adjusted R Square sebesar 0,390424 yang berarti bahwa belanja modal pada kota kota di Indonesia bagian barat adalah 39,04% dipengaruhi oleh rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Sisanya 60,96% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Rasio Desentralisasi fiskal Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan kesimpulan pengujian dengan menggunakan Eviews 10, diperoleh t-statistic untuk variabel rasio desentralisasi fiskal -3,417779 dengan nilai probabilitas 0,0009. Nilai probabilitas rasio desentralisasi fiskal lebih kecil dari 0,05 atau nilai (0,0009<0,05). Sehingga rasio desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal kota kota di Indonesia bagian barat periode 2020-2022. Kesimpulan uji ini sependapat dengan (Praza et al., 2016) yang menyatakan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap belanja modal. Kesimpulan uji ini tidak sependapat dengan (Marlianita & Saleh, 2020), (Azzahra & Sudrajat, 2022) yang menemukan hasil bahwa rasio desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan kesimpulan pengujian menggunakan Eviews 10, diperoleh t-statistic untuk variabel rasio efektivitas 3.643023 dengan nilai signifikansi 0,0004. Nilai probabilitas rasio



efektivitas lebih kecil dari 0,05 atau nilai ($0,0004 < 0,05$). Sehingga rasio efektivitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kota kota di Indonesia bagian barat periode 2020-2022. Kesimpulan uji ini sependapat dengan (Setiawina, 2015) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Kesimpulan uji ini tidak sependapat dengan (Novita & Nurhasanah, 2021) yang menemukan hasil bahwa rasio efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal serta kajian (Andriyani et al., 2020) dan (Praza et al., 2016) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap belanja Modal

Berdasarkan kesimpulan pengujian menggunakan Eviews 10, diperoleh t-statistic untuk variabel rasio efisiensi 2.701881 dengan nilai signifikansi 0,0079. Nilai probabilitas rasio efisiensi lebih kecil dari 0,05 atau nilai ($0,0079 < 0,05$). Sehingga rasio efisiensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kota kota di Indonesia bagian barat periode 2020-2022. Kesimpulan uji ini sependapat dengan (Andriyani et al., 2020), (Azzahra & Sudrajat, 2022) dan (Andriyani et al., 2020) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Kesimpulan uji ini tidak sependapat dengan (Novita & Nurhasanah, 2021) yang menemukan hasil bahwa rasio efisiensi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa rasio desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Rasio efektivitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Serta rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dilihat dari hasil uji simultan ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai adjusted r square sebesar 39,04%. Hal ini memberikan arti bahwa apabila kinerja keuangan daerah baik, maka alokasi belanja modal pada APBD akan meningkat. Sedangkan sisanya 60,96% menunjukkan masih perlu di cari variabel lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini, sehingga peneliti selanjutnya dapat mencari lebih banyak lagi variabel yang dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap belanja modal kota kota di Indonesia wilayah barat. Saran untuk penelitian ini pemerintah daerah diharapkan dapat mengefisienkan belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Keluarga, Dosen Pembimbing, dan seluruh dosen S1 Akuntansi UNIB yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Andriyani, N., Mukhzarudfa, M., & Diah PA, E. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(2), 132–144. <https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263>
- Azzahra, A., & Sudrajat. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 174–182. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3397>
- Basuki, A. T. R. I., & Yuliadi, I. (n.d.). *Electronic data processing*.
- Dzulhidayat. (2022). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021. *77&7*,



3(8.5.2017), 2003–2005.

Ekowati, S., & Fintahiasari, M. (2020). Jurnal ilmiah akuntansi, manajemen & ekonomi islam (jam-ekis) volume 3, no. 1, januari 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (Jam-Ekis)*, 3(1), 1–14.

Fachruzzaman, F., & Baihaqi, B. (2021). Pengaruh Implementasi Anggaran Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(2), 213–230. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i2.15286>

Fachruzzaman, F., Suranta, E., & Martini, E. (2021). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Fairness*, 5(3), 123–138. <https://doi.org/10.33369/fairness.v5i3.15310>

Fachruzzaman, & Martiah, L. (2013). Pelaporan Keuangan Atas Pengelolaan Retribusi Pasar Kabupaten Rejang Lebong Tinjauan Efisiensi Dan Efektivitas. 3, 181–198.

Husna, A. U., Susanti, D., & Padang, U. N. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Solok Universitas Negeri Padang This exploration delegated a similar causal examination . The information used is the regional government financial plan (APBD) repor. 01(2), 153–163.

Kadek, N., & Indrawati, N. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Ni. 8(5), 2834–2861.

Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi , Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah , dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25–35. <https://jurnal-akuntansi.polban.ac.id/>

Mianti, R., & Fachruzzaman, F. (2020). Analysis Financial Performance of Regional Government in Bengkulu Province. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 21(2), 164–174. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.699>

Novita, I., & Nurhasanah, N. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Se-Jawa Barat. May. <https://doi.org/10.36805/bi.v4i2.1050>

Nurarifah, R., Afrizal, & L, T. A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 93–104. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/16245>

Praza, E. I., Ratio, F. I., Independence, F., Keuangan, R. K., & Keuangan, K. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. 4(1), 25–36.

Robinson, R. (2021). Pemanfaatan Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dalam Pencalonan Kembali Incumbent. *Jurnal Fairness*, 3(3), 285–312. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i3.15291>

Setiawina, N. D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S . D . 2013. 20(2), 104–112.



Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22>

Ula, N. N., Bharata, R. W., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Tidar, U., Efektivitas, R., Efisiensi, R., Kemandirian, R., & Keuangan, R. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Apbd Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020). *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 405–414.